DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004,

Abd. *Asis*, dan *Andi Sofyan.Hukum Acara Pidana*. Kencana, Jakarta:

David Osborne Ted Gaebler. 2008. *Mewirausahakan Birokrasi (Reinventing.Government)*. Teruna Gravika: Jakarta

Djajoesman HS, 1976. Grafik lalu lintas dan angkutan jalan, Balai *Pustaka*, Jakarta

Hari Sasangka dan Lili Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003

Lilik Mulyadi. Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya. Bandung. Alumni. 2007

Luhut MP Pangaribuan. 2005. *Hukum Acara Pidana: Surat-surat Resmi di Pengadilan oleh Advoca*t. Djambatan. Jakarta

Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta,1983

M. Yahya Harahap. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali. Edisi Kedua. Jakarta. Sinar Grafika. 2008.

M Yahya Harahap, 2005, *Pembahasan mengenai Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan*, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, Sinar Grafika, Jakarta

Ojisman Samosir, 2013. *Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana*, Bandung: Nuansa Aulia

Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban pidana, Aksara Baru, Jakarta

Sudarsono, 2007, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta

Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif, PT Raja Grafindo Peresada, Jakarta, 2006

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VII/MPR/2000 tentang Tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Wetboek van Strafrecht (WvS) tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Peraturan Kapolri Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas

Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengaturan Lalu Lintas Dalam Keadaan Tertentu Dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas

Standar Operasional Prosedur Penanganan Laka Lantas

C. Lain-Lain

http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4c47cc2381f7a/Talk!hukumonline-discussion. Diakses pada tanggal 21 April 2018, jam 19.30 Wib